

Inisiatif Pariwisata Bebas Plastik: Praktik Terbaik dari Destinasi-Destinasi Indonesia

Muhammad Rahmad¹, Syifa Anggraeny²

¹² Institut Pariwisata Trisakti, Jakarta
muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik terbaik inisiatif pariwisata bebas plastik di destinasi-destinasi Indonesia, dengan mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif yang berfokus pada tiga destinasi wisata utama di Indonesia, yaitu Bali, Labuan Bajo, dan Raja Ampat, melalui analisis dokumen resmi, kebijakan regulasi, serta sintesis informasi sekunder dari publikasi pemerintah, artikel ilmiah, dan laporan lembaga lingkungan hidup periode 2021 hingga 2025. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan inisiatif bebas plastik bergantung pada kolaborasi multipemangku kepentingan yang melibatkan otoritas pemerintah, pelaku industri pariwisata, komunitas lokal, dan wisatawan, dengan faktor keberhasilan utama yang meliputi kerangka regulasi yang kuat, program edukasi berkelanjutan, ketersediaan alternatif ramah lingkungan, serta integrasi sistem pengetahuan adat dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur pariwisata berkelanjutan dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk implementasi strategi pengurangan plastik di destinasi pulau dan pesisir, beserta rekomendasi praktis bagi pengelola destinasi dan pembuat kebijakan. Studi ini menawarkan analisis komparatif implementasi pariwisata bebas plastik di berbagai tipologi destinasi Indonesia, dengan mengintegrasikan teori pemangku kepentingan dan prinsip ekonomi sirkular dalam konteks pariwisata.

Kata Kunci: *pariwisata bebas plastik; pengelolaan destinasi berkelanjutan; kolaborasi pemangku kepentingan; ekonomi sirkular; Indonesia*

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan pilar ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, berkontribusi secara substansial terhadap pembangunan nasional melalui perolehan devisa dan penciptaan lapangan kerja. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2023), sektor pariwisata berkontribusi lebih dari 4% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia sebelum pandemi COVID-19, yang menunjukkan peran kritisnya dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2024, Indonesia menyambut 13,9 juta wisatawan mancanegara dan menghasilkan pendapatan sekitar USD 16,70 miliar dari pengeluaran wisatawan (BPS-Statistics Indonesia, 2024). Namun, kemakmuran ekonomi ini membawa tantangan lingkungan yang menyertainya, khususnya terkait akumulasi sampah plastik di destinasi wisata.

Indonesia menghadapi tantangan polusi plastik yang kritis, menempati posisi sebagai salah satu penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia. Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 3,2 juta ton sampah yang tidak terkelola setiap tahunnya, dengan hampir 1,3 juta ton di antaranya akhirnya mencapai lingkungan laut (World Bank, 2024). Industri

pariwisata memperparah masalah ini secara signifikan, karena wisatawan menghasilkan sekitar 3,5 kali lebih banyak sampah plastik per kapita dibandingkan penduduk setempat (Bali Partnership, 2023). Di Bali saja, sekitar 300.000 ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun, dengan lebih dari 33.000 ton masuk ke saluran air dan laut setiap tahunnya. Degradasi lingkungan ini mengancam aset alam yang menarik wisatawan, menciptakan siklus tidak berkelanjutan yang merusak kelayakan pariwisata jangka panjang.

Konsep pariwisata bebas plastik telah muncul sebagai respons strategis terhadap tekanan lingkungan tersebut, yang merepresentasikan upaya sistematis untuk mengurangi, membatasi, atau menghilangkan plastik sekali pakai di sepanjang rantai nilai pariwisata (UNWTO & UNEP, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDG 14 yang mengatur konservasi ekosistem laut. Beberapa destinasi Indonesia telah memelopori inisiatif pengurangan plastik, menghadirkan studi kasus yang berharga untuk memahami faktor-faktor keberhasilan implementasi dan tantangan yang masih ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inisiatif pariwisata bebas plastik di tiga destinasi Indonesia yang khas, yaitu Bali, Labuan Bajo, dan Raja Ampat, guna mengidentifikasi praktik terbaik, menganalisis faktor-faktor pemungkin, dan memahami hambatan implementasi. Dua pertanyaan penelitian mengarahkan penyelidikan ini: (1) Apa yang merupakan praktik terbaik dalam implementasi inisiatif pariwisata bebas plastik di destinasi-destinasi Indonesia? dan (2) Faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan inisiatif-inisiatif tersebut?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kerangka Teoritis

Penelitian ini mengintegrasikan Teori Pemangku Kepentingan dengan prinsip Ekonomi Sirkular untuk menganalisis implementasi pariwisata bebas plastik. Teori Pemangku Kepentingan, sebagaimana diartikulasikan oleh Freeman (1984) dan selanjutnya dikembangkan oleh Byrd (2007) untuk konteks pariwisata, mengemukakan bahwa pembangunan destinasi yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan yang terkoordinasi di antara berbagai kelompok kepentingan, termasuk otoritas pemerintah, operator sektor swasta, komunitas lokal, dan pengunjung. Aplikasi kontemporer teori ini dalam pariwisata menekankan bahwa hasil keberlanjutan destinasi bergantung pada kualitas mekanisme kolaborasi dan struktur tata kelola bersama di antara para pemangku kepentingan (Dodds, 2025; Wondirad et al., 2024).

Kerangka Ekonomi Sirkular memberikan landasan teoretis yang komplementer dengan mengonseptualisasikan limbah bukan sebagai produk akhir, melainkan sebagai sumber daya yang perlu dipulihkan dan diintegrasikan kembali ke dalam sistem ekonomi (Li et al., 2024). Diterapkan pada pariwisata, prinsip-prinsip ekonomi sirkular menganjurkan penghapusan barang-barang sekali pakai, perancangan produk untuk penggunaan ulang dan daur ulang, serta regenerasi sistem alam melalui praktik operasional yang bertanggung jawab (Rodríguez et al., 2022). Kerangka ini mendukung transisi dari pola konsumsi linier menuju sistem siklus tertutup yang meminimalkan eksternalitas lingkungan sekaligus mempertahankan kualitas layanan pariwisata.

2.2 Polusi Plastik dalam Konteks Pariwisata

Kegiatan pariwisata menghasilkan sampah plastik dalam jumlah besar melalui layanan akomodasi, operasional makanan dan minuman, transportasi, serta kegiatan rekreasi (Pandey et al., 2023). Penelitian oleh Koiwanit dan Filimonau (2023) yang mengkaji pulau-pulau wisata kecil menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan sampah semakin besar di destinasi dengan infrastruktur terbatas, isolasi geografis, dan fluktuasi pengunjung musiman. Ketergantungan industri pariwisata pada plastik sekali pakai demi kemudahan, kebersihan, dan efisiensi biaya telah menciptakan ketergantungan sistemik yang terbukti sulit untuk dihentikan tanpa intervensi yang terkoordinasi.

Inisiatif global seperti Global Tourism Plastics Initiative (GTPI), yang dikoordinasikan oleh UNWTO dan UNEP, telah menetapkan kerangka kerja untuk komitmen pengurangan plastik di sektor pariwisata. Inisiatif ini mensyaratkan penandatanganan untuk menghapus item plastik yang bermasalah, beralih ke model yang dapat digunakan kembali, dan berkolaborasi di sepanjang rantai nilai guna mencapai perubahan sistemik. Literatur akademik semakin banyak mendokumentasikan intervensi yang berhasil di destinasi seperti Kepulauan Balearik (Spanyol), Koh Phayam di Thailand, dan berbagai komunitas pesisir Mediterania, yang menyediakan titik acuan bagi implementasi di pasar berkembang (Agarwal, 2024).

2.3 Kolaborasi Multipemangku Kepentingan dalam Pariwisata Berkelanjutan

Pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang efektif memerlukan kolaborasi sistematis di antara berbagai kelompok pemangku kepentingan dengan kepentingan, kapasitas, dan sumber daya yang beragam. Pennington-Gray dan Basurto-Cedeno (2023) menekankan bahwa memprioritaskan perspektif transdisipliner sangat penting bagi keberhasilan destinasi, karena sistem pariwisata terdiri dari hubungan yang nonlinier dan saling bergantung di antara berbagai jenis bisnis dan elemen komunitas. Penelitian dalam konteks Indonesia oleh Kurniawan et al. (2023) menunjukkan bahwa model pengelolaan terpadu yang menggabungkan subsistem lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui kolaborasi lintas sektor menghasilkan luaran keberlanjutan yang lebih unggul dibandingkan pendekatan yang terfragmentasi.

3. Metodologi

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif berganda untuk mengkaji inisiatif pariwisata bebas plastik di tiga destinasi Indonesia: Bali, Labuan Bajo, dan Raja Ampat. Pendekatan studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks dalam konteks dunia nyata, yang sangat tepat untuk mengkaji proses implementasi kebijakan dan dinamika pemangku kepentingan (Yin, 2018). Pemilihan tiga kasus memungkinkan perbandingan lintas kasus sekaligus mempertahankan kedalaman analisis dalam setiap konteks destinasi.

3.2 Pemilihan Kasus

Kasus-kasus dipilih berdasarkan kriteria purposive sampling yang meliputi: dokumentasi inisiatif pengurangan plastik, keragaman tipologi destinasi dan struktur tata kelola,

ketersediaan data sekunder, serta signifikansi dalam kerangka kebijakan pariwisata Indonesia. Bali mewakili destinasi yang matang dengan volume tinggi dan kerangka regulasi yang komprehensif; Labuan Bajo menjadi contoh destinasi berkembang dengan status Cagar Biosfer UNESCO; sementara Raja Ampat menggambarkan model ekowisata berbasis komunitas dengan tradisi tata kelola adat yang kuat.

3.3 Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen sistematis yang mencakup peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, laporan organisasi lingkungan, publikasi akademik, dan liputan media dari tahun 2018 hingga 2025. Sumber data sekunder meliputi laporan dari Bali Partnership, penilaian lingkungan Sungai Watch, analisis World Bank untuk Indonesia, serta statistik pemerintah provinsi. Analisis tematik mengikuti kerangka Braun dan Clarke (2006) digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola lintas kasus, sehingga memungkinkan identifikasi faktor-faktor keberhasilan umum, pendekatan implementasi yang khas, dan tantangan-tantangan yang persisten.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Kasus: Bali sebagai Pelopor Inisiatif Bebas Plastik

Bali muncul sebagai destinasi pelopor Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan pengurangan plastik yang komprehensif melalui Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 (Pergub 97/2018), yang secara resmi melarang kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik, dan styrofoam di seluruh provinsi, berlaku efektif sejak pertengahan 2019. Intervensi regulasi ini merespons tekanan lingkungan yang meningkat dari sebuah pulau yang menghasilkan sekitar 1,6 juta ton sampah setiap tahun, dengan plastik mencapai hampir 20% dari total volume sampah dan 33.000 ton masuk ke lingkungan laut setiap tahunnya (Bali Partnership, 2023).

Keberhasilan implementasi kerangka regulasi ini sangat bergantung pada keselarasan multipemangku kepentingan. Operator industri pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan gerai ritel, secara bertahap mengadopsi material alternatif seperti sedotan bambu, kantong belanja yang dapat digunakan kembali, dan kemasan yang dapat terurai secara biologis. Gerakan "Bye Bye Plastic Bags" yang diprakarsai oleh aktivis muda Melati dan Isabel Wijzen menunjukkan potensi katalitik keterlibatan masyarakat sipil dalam mengubah wacana publik dan menciptakan tekanan sosial bagi tindakan kebijakan. Lembaga pendidikan mengintegrasikan kurikulum lingkungan hidup, sementara kegiatan bersih-bersih pantai secara rutin menjadi praktik komunitas yang lazim.

Meskipun demikian, kesenjangan implementasi masih terus berlangsung. Audit lingkungan oleh Sungai Watch (2024) mengindikasikan bahwa kantong plastik masih termasuk di antara item sampah yang paling sering ditemukan di sungai-sungai Bali, yang menunjukkan adanya tantangan penegakan hukum dan kebutuhan akan upaya perubahan perilaku yang berkelanjutan. Keterbatasan infrastruktur, khususnya dalam pengumpulan, pemilahan, dan fasilitas daur ulang sampah, membatasi efektivitas kebijakan pengurangan dari sumber. Pada April 2025, Gubernur I Wayan Koster menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 yang memperketat pembatasan dengan melarang air minum kemasan plastik sekali pakai di bawah

satu liter, yang merepresentasikan evolusi kebijakan yang berkelanjutan untuk mengatasi sumber polusi yang persisten.

4.2 Analisis Kasus: Model Pariwisata Berkelanjutan Labuan Bajo yang Berkembang

Labuan Bajo, yang berfungsi sebagai pintu masuk menuju Taman Nasional Komodo dan ditetapkan sebagai Cagar Biosfer UNESCO, menjadi kasus khas implementasi pariwisata bebas plastik dalam konteks destinasi yang sedang berkembang pesat. Penelitian oleh Kurniawan et al. (2023) yang memodelkan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo menunjukkan pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan daya dukung lingkungan melalui pendekatan multipemangku kepentingan yang terpadu. Klasifikasi World Bank terhadap destinasi ini sebagai Kawasan Pariwisata Khusus telah menarik investasi infrastruktur yang substansial, sekaligus meningkatkan tekanan pengelolaan lingkungan.

Inisiatif pengurangan plastik di Labuan Bajo telah berkembang melalui langkah-langkah kebijakan bertahap yang menargetkan fasilitas pariwisata dan ruang publik. Hotel dan operator perahu wisata telah didorong untuk menghapus penyediaan air minum kemasan plastik berukuran kecil, dengan jadwal penegakan progresif yang diumumkan untuk kepatuhan penuh (Antara News, 2025). Organisasi komunitas lokal dan LSM telah menyelenggarakan lokakarya peningkatan kapasitas yang membahas praktik pengelolaan sampah, alternatif produk ramah lingkungan, dan kampanye kesadaran lingkungan yang menysasar penduduk maupun wisatawan.

Namun demikian, Labuan Bajo menghadapi tantangan struktural yang signifikan, termasuk infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, keterbatasan akses terhadap produk alternatif yang terjangkau, dan kesadaran lingkungan yang relatif rendah di kalangan sebagian penduduk lokal yang terbiasa dengan pola konsumsi tradisional. Keterpencilan geografis destinasi ini meningkatkan biaya logistik, baik untuk ekspor sampah maupun impor alternatif ramah lingkungan, sehingga menciptakan hambatan ekonomi dalam transisi tersebut. Keberhasilan memerlukan investasi terkoordinasi dalam pengembangan infrastruktur disertai edukasi dan mekanisme insentif yang berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan perilaku.

4.3 Analisis Kasus: Pendekatan Konservasi Berbasis Komunitas Raja Ampat

Raja Ampat merepresentasikan model khas yang mengintegrasikan pariwisata bebas plastik dengan sistem tata kelola adat dan konservasi berbasis komunitas. Sebagai rumah bagi lebih dari 75% spesies karang yang diketahui di dunia, keanekaragaman hayati laut Raja Ampat yang luar biasa memberikan justifikasi ekologis yang kuat bagi langkah-langkah perlindungan lingkungan yang ketat (Azizah & Abdullah, 2024). Keterpencilan relatif destinasi ini dan keterbatasan infrastruktur pengunjung secara paradoks telah memudahkan implementasi praktik berkelanjutan dengan membatasi skala pengembangan pariwisata yang intensif dalam konsumsi.

Sistem tata kelola "sasi" tradisional, yang merepresentasikan praktik pengelolaan sumber daya laut secara adat, telah diadaptasi untuk memasukkan tujuan pengurangan plastik. Otoritas desa telah mengimplementasikan peraturan lokal yang melarang plastik sekali pakai dalam kegiatan pariwisata, dengan mekanisme penegakan yang tertanam dalam struktur sosial komunitas. Operator pariwisata telah mengadopsi kebijakan "zero plastic onboard" untuk kapal selam dan

liveboard, menyediakan wadah air isi ulang dan peralatan makan yang dapat digunakan kembali sebagai pengganti alternatif sekali pakai.

Tantangan Raja Ampat terutama berkaitan dengan kapasitas pengelolaan sampah di lokasi pulau-pulau terpencil yang tidak memiliki infrastruktur pengumpulan dan pengolahan formal. Akumulasi sampah yang sering memerlukan pembakaran atau penimbunan karena tidak adanya alternatif menciptakan dampak lingkungan lokal, meskipun konsumsi plastik telah berkurang. LSM internasional dan domestik telah memberikan dukungan melalui program pelatihan, penyediaan peralatan daur ulang, dan pengembangan rantai pasokan produk ramah lingkungan. Namun demikian, keberlanjutan intervensi-intervensi ini di luar siklus pendanaan eksternal masih belum pasti.

4.4 Analisis Lintas Kasus: Faktor Keberhasilan dan Tantangan

Tabel 1. Analisis Komparatif Inisiatif Pariwisata Bebas Plastik

Faktor	Bali	Labuan Bajo	Raja Ampat
Kerangka Regulasi	Komprehensif (Pergub 97/2018)	Berkembang	Adat (Sasi)
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Tinggi (multisektor)	Sedang (berkembang)	Tinggi (berbasis komunitas)
Infrastruktur	Sedang (berkembang)	Terbatas	Sangat Terbatas
Program Edukasi	Ekstensif	Berkembang	Terarah
Produk Alternatif	Tersedia Luas	Akses Terbatas	Akses Terbatas

Catatan. Dikompilasi dari berbagai sumber (2023–2025)

Analisis lintas kasus mengungkapkan empat faktor keberhasilan kritis bagi implementasi pariwisata bebas plastik. Pertama, kolaborasi multipemangku kepentingan yang kuat, yang melibatkan otoritas pemerintah, operator industri pariwisata, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil, menciptakan fondasi bagi aksi yang terkoordinasi dan komitmen yang berkelanjutan. Kedua, kerangka regulasi yang jelas dengan mekanisme penegakan menyediakan struktur yang diperlukan bagi perubahan perilaku, meskipun efektivitasnya bergantung pada kapasitas implementasi dan kemauan politik. Ketiga, program pendidikan dan kesadaran yang berkelanjutan yang menasar audiens beragam—termasuk penduduk, pekerja pariwisata, dan wisatawan—membangun pemahaman dan motivasi intrinsik untuk perlindungan lingkungan. Keempat, ketersediaan produk alternatif yang terjangkau dan mudah diakses memungkinkan transisi praktis dari plastik sekali pakai tanpa membebankan biaya yang terlalu besar kepada pelaku usaha maupun konsumen.

Tantangan yang persisten di semua kasus mencakup keterbatasan infrastruktur untuk pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah; kesulitan dalam mengubah perilaku konsumsi yang telah tertanam; hambatan ekonomi terhadap adopsi produk alternatif; serta tantangan dalam pemantauan dan penegakan di berbagai wilayah geografis yang tersebar luas. Analisis menunjukkan bahwa inisiatif pariwisata bebas plastik mencapai dampak paling besar ketika menggabungkan pendekatan regulasi dari atas (top-down) dengan keterlibatan komunitas dari bawah (bottom-up), yang didukung oleh investasi infrastruktur yang memadai dan upaya pendidikan yang berkelanjutan.

5. Kesimpulan

5.1 Simpulan

Penelitian ini mengkaji inisiatif pariwisata bebas plastik di tiga destinasi Indonesia dan mengungkapkan bahwa implementasi yang berhasil memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan kerangka regulasi, kolaborasi pemangku kepentingan, program edukasi, pengembangan infrastruktur, dan ketersediaan produk alternatif. Bali menunjukkan potensi intervensi kebijakan yang komprehensif yang didukung oleh keterlibatan masyarakat sipil yang kuat, sementara Labuan Bajo menggambarkan tantangan yang dihadapi destinasi yang berkembang pesat dengan infrastruktur terbatas. Raja Ampat menawarkan wawasan tentang model konservasi berbasis komunitas yang mengintegrasikan sistem tata kelola adat dengan tujuan keberlanjutan kontemporer.

5.2 Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada literatur pariwisata berkelanjutan dengan menunjukkan penerapan teori pemangku kepentingan terpadu dan kerangka ekonomi sirkular dalam menganalisis inisiatif pengurangan plastik di destinasi pasar berkembang. Temuan-temuan ini mendukung proposisi bahwa pengelolaan lingkungan yang efektif dalam pariwisata memerlukan pendekatan tata kelola multilevel yang menggabungkan mekanisme regulasi formal dengan sistem berbasis komunitas yang informal. Secara praktis, penelitian ini memberikan manajer destinasi dan pembuat kebijakan rekomendasi berbasis bukti untuk mengimplementasikan strategi pariwisata bebas plastik yang disesuaikan dengan berbagai konteks kelembagaan dan ketersediaan sumber daya.

5.3 Keterbatasan dan Penelitian Ke Depan

Keterbatasan penelitian ini mencakup ketergantungan pada sumber data sekunder dan kendala inheren dalam generalisasi studi kasus. Penelitian mendatang sebaiknya menggunakan metode pengumpulan data primer, termasuk wawancara pemangku kepentingan dan penilaian observasional, untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika implementasi. Studi longitudinal yang melacak hasil inisiatif selama periode yang lebih panjang akan memberikan wawasan berharga tentang keberlanjutan intervensi. Penelitian komparatif di destinasi-destinasi Indonesia lainnya dan konteks internasional akan meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan pariwisata bebas plastik. Penilaian kuantitatif yang mengukur hasil pengurangan sampah secara aktual akan melengkapi analisis proses kualitatif yang disajikan dalam penelitian ini.

Referensi

Agarwal, S. (2024). Four decades of sustainable tourism research: Trends and future research directions. *International Journal of Tourism Research*, 26(2), e2643.
<https://doi.org/10.1002/jtr.2643>

Azizah, N. N., & Abdullah, N. (2024). Upaya menjaga Raja Ampat sebagai sustainable tourism melalui prinsip sustainability dan blue economy. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1).

Bali Partnership. (2023). *Bali plastic waste research report*. <https://www.balipartnership.org>

BPS-Statistics Indonesia. (2024). *Growth of tourism in Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>

Byrd, E. T. (2007). Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: Applying stakeholder theory to sustainable tourism development. *Tourism Review*, 62(2), 6–13. <https://doi.org/10.1108/16605370780000309>

Dodds, R. (2025). Longitudinal assessment of sustainable tourism governance evolution. *Journal of Sustainable Tourism*, 33(1), 45–67.

Koiwanit, J., & Filimonau, V. (2023). Stakeholder collaboration for solid waste management in a small tourism island. *PLOS ONE*, 18(7), e0288839. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288839>

Kurniawan, F., et al. (2023). Collaborative integrated sustainable tourism management model using system dynamics: A case of Labuan Bajo, Indonesia. *Sustainability*, 15(15), 11937. <https://doi.org/10.3390/su151511937>

Li, K., et al. (2024). Circular economy and sustainability in the tourism sector. *Environment, Development and Sustainability*, 26(7), 16461–16482.

Pandey, P., Dhiman, M., Chopra, P., & Adlakha, A. (2023). Investigating the role of tourists and the impact of knowledge, behaviour, and attitude towards plastic waste generation. *Circular Economy and Sustainability*, 3, 1013–1027. <https://doi.org/10.1007/s43615-022-00216-3>

Pennington-Gray, L., & Basurto-Cedeno, E. (2023). Integrated stakeholder-centered tourism crisis management. *Frontiers in Sustainable Tourism*, 2, 1209325. <https://doi.org/10.3389/frsut.2023.1209325>

Rodríguez, C., Florido, C., & Jacob, M. (2022). Circular economy contributions to the tourism sector: A critical literature review. *Sustainability*, 14(5), 2852.

Sungai Watch. (2024). *2024 Impact report: River plastic pollution in Bali*. <https://sfrancesca.sungaiwatch.org>

UNWTO & UNEP. (2023). *Global Tourism Plastics Initiative: Progress report 2023*. World Tourism Organization.

Wondirad, A., et al. (2024). Sustainable tourism governance frameworks for Eastern Africa. *Tourism Management Perspectives*, 49, 101178.

World Bank. (2024). *Indonesia marine debris hotspot assessment*. World Bank Group.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.